



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

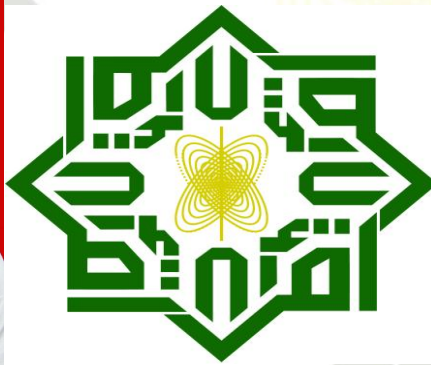
TUGAS AKHIR

TATA CARA PENERBITAN SURAT KETETAPAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA PEKANBARU

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md)
Pada Program Studi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan
Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Oleh :

REVI ASRAINI
NIM: 01676201934



UIN SUSKA RIAU

PROGRAM STUDI D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU

2019



LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

: REVI ASRAINI

: 01676201934

: EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

: DIPLOMA 3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN

: VII (TUJUH)

: TATA CARA PENERBITAN SURAT KETETAPAN PAJAK
PADA KPP MADYA MADYA PEKANBARU

PEKANBARU, 06 Januari 2020

DISETUIJUI OLEH:

PEMBIMBING

DR. KAMARUDDIN, S.Sos, MSi**NIP. 19790101 200710 1 003**

MENGETAHUI:

DEKAN

KETUA PRODI

**Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag. MM****NIP. 19620512 198903 1 003**
SAHWITRI TRIANDANI, SE, M.Si**NIP. 19820806 200604 2 002**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LEMBAR PENGESAHAN

: REVI ASRAINI
 : 01676201934
 : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 : DIPLOMA 3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
 : VII (TUJUH)
 : TATA CARA PENERBITAN SURAT KETETAPAN PAJAK
 PADA KPP MADYA MADYA PEKANBARU

PEKANBARU, 09 Januari 2020

DISETUJUI OLEH:

KETUA PENGUJI

Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si
 NIP. 19790101 200710 1 003

ANGGOTA

PENGUJI I

Khairil Henry, SE, M.Si, Ak
 NIP. 19751129 200801 1 009

PENGUJI II

Irien Violinda Anggriani, SE, M.Si
 NIP. 19751106 200710 2 003

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sunan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

TATA CARA PENERBITAN SURAT KETETAPAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA PEKANBARU

Oleh:

REVI ASRAINI

NIM: 01676201934

Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Pekanbaru dalam peraturan menteri keuangan Nomor: 145/PMK.03/2012 adalah dalam jangka 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian pajak, atau tahun pajak Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar atau surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Direktur Jenderal Pajak tetap dapat menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar atau surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan walaupun jangka waktu 5 tahun sudah lewat, surat ketetapan pajak meliputi surat ketetapan kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak nihil, atau surat ketetapan pajak lebih bayar surat ketetapan pajak ini sebagai suatu ketetapan tertulis yang menimbulkan hak dan kewajiban, membuat besarnya utang pajak pada tahun tertentu bagi wajib pajak yang nama dan alamatnya tercantum dalam surat ketetapan pajak.

Kata kunci : Surat Ketetapan Pajak



KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat beserta salam penulis kirimkan untuk nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia ke alam yang penuh keimanan dan ilmu pengetahuan.

Tugas akhir dengan judul **“TATA CARA PENERBITAN SURAT KETETAPAN PAJAK PADA KPP MADYA PEKANBARU”** merupakan hasil karya ilmiah yang ditulis untuk memenuhi salah satu persyaratan mendapatkan gelar Ahli Madya (A.Md) pada jurusan Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam menyelesaikan tugas akhir ini penulis mendapatkan dukungan dalam berbagai bentuk dan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan banyak terimakasih atas semua bantuan dan dukungan yang telah diberikan. disamping itu penulis juga menerima bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan uluran tangan dan kemurahan hati kepada penulis. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan dengan penuh hormat ucapan terimakasih kepada:

1. Kepada kedua orang tua kandung tercinta, ayah anda Inprima dan ibunda Asmawati yang telah memberikan cinta dan kasih sayang sehingga penulis mampu dan semangat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Semoga ayah dan bunda diberi kesehatan oleh Allah SWT.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Kepada kakak-kakak tersayang yang telah memberikan nasehat, dukungan moril dan mencukupi segala kebutuhan dan keperluan anda selama menjalani pendidikan. Terutama untuk kakak Deli hasanah.
3. Bapak Prof. Dr KH Ahmad Mujahidin S.Ag., M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta pembantu I, II, III, yang telah memberikan waktu kepada peneliti untuk menuntut ilmu di perguruan tinggi ini.
4. Bapak Dr.Drs H Muh Said HM, M. Ag, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau
5. Ibu Dr Leny Nofianti MS, SE, M.Si, AK, CA selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang telah banyak membantu menyelesaikan Tugas Akhir ini
6. Ibu Sawitri Triandani SE M.Si selaku ketua Program Studi D3 administrasi perpajakan
7. Ibu Irien Violinda Anggriani, SE, MSi selaku Sekretaris Program Studi D3 Administrasi Perpajakan
8. Bapak Dr.Kamaruddin, S.Sos., MSi selaku dosen pembimbing Tugas Akhir yang selalu memberikan nasehat, motivasi, serta membantu dalam perbaikan kesalahan-kesalahan dalam penulisan Tugas Akhir ini.
9. Kepada seluruh Dosen dan Pegawai D3 Administasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang telah mendidik selama saya menjadi mahasiswa di jurusan D3 administrasi perpajakan ini sehingga saya bisa menyelesaikan program Diploma D3 ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

10. Kepada kantor KPP Madya Pekanbaru , terimakasih kepada kepala kantor Madya pekanbaru, Harri Hermawati Soelias, Buk Arini, makasih telah mengizinkan kepada penulis untuk mengambil data di kantor KPP Madya Pekanbaru.

11. Buat Sahabat tersayang saya laila maydina, wulan refita aryani, Hosi riska mariana, yang selalu ada disaat sedih dan bahagia makasih buat semua yang kalian lakukan sehingga memotivasi saya agar cepat menyelesaikan Tugas Akhir ini.

12. Kepada rekan-rekan mahasiswa/i Administrasi Perpajakan yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas kerjasama.

13. Kepada Doni Saputra terima kasih sudah menjadi sahabat serta teman, terbaik yang selalu memberikan semangat kepada penulis, selalu memberikan nasehat kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Dan kepada semua pihak yang telah membantu penulis , penulis mengucapkan terimakasih banyak. Semoga semua bantuannya dibalas oleh Allah SWT dengan balasan yang setimpal. Aamiin

Apabila ada kesalahan serta kekurangan penulis mengucapkan mohon maaf, karena penulis hanya manusia biasa yang tidak lepas dari kesalahan. Yang baik datangny dari Allah SWT dan yang buruk datang dari penulis sendiri. Semoga Tugas Akhir (TA) ini dapat bermanfaat bagi penulis dan mahasiswa lain khususnya mahasiswa jurusan DIII Administrasi Perpajakan yang tertarik membahas masalah.Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Pada Kantor



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pelayanan pajak. Semoga penelitian ini bermanfaat untuk pengembangan khususnya Administrasi Perpajakan.

Wassalam,

Pekanbaru, 24 November 2019
Penulis,

(REVI ASRAINI)



UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	
LEMBAR PENGESAHAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Perumusan Masalah	3
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
1.4 Metode Penelitian	4
1.5 Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN UMUM	8
2.1 Gambaran Umum Mengenai Kantor Pelayanan Pajak (KPP)	8
2.2 Sejarah Berdirinya Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pertama Pekanbaru Madya	9
2.3 Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Pekanbaru .	10
2.4 Logo Kementerian Keuangan Republik Indonesia	11
2.5 Struktur Organisasi Unit Kerja KPP Madya Pekanbaru	13
2.6 Struktur Organisasi	14
2.7 Tugas dan Fungsi	15
2.8 Bagian Unit Kerja Kantor Pelayanan (KPP) Madya Pekanbaru	16
2.9 Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jendral Pajak	19
2.10 Nilai-Nilai dan Kode Etik Pegawai Direktorat Jendral Pajak	21
2.11 Kewajiban dan Larangan dalam Kode Etik Pegawai Direktorat Jendral Pajak (DJO)	23



BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK	25
3.1 Tinjauan teori	25
3.1.1 Pengertian Pajak	25
3.1.2 Fungsi Pajak	28
3.1.3 Pengelompokan Pajak	29
3.1.4 Sistem Pemungutan Pajak	32
3.1.5 Pengertian Surat Pemberitahuan	33
3.1.6 Jenis Surat Pemberitahuan	33
3.1.7 Pengertian Surat Ketetapan Pajak	35
3.1.8 Dasar Hukum	36
3.1.9 Jenis-Jenis Surat Ketetapan Pajak	36
3.1.10 Tata Dcara Penerbita Surat Ketetapan Pajak	38
3.1.11 Sanksi Adminsitrase	43
3.1.12 Pajak Menurut Pandangan Islam	44
3.2 Tinjauan Praktek	47
3.2.1 Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Pada KPP	
Madya Pekanbaru	47
3.2.2 Perbandingan Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak	
antara Teori dan Praktek Pada Kantor Pelayanan Pajak	
Madya Pekanbaru	52
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	54
4.2 Saran	55

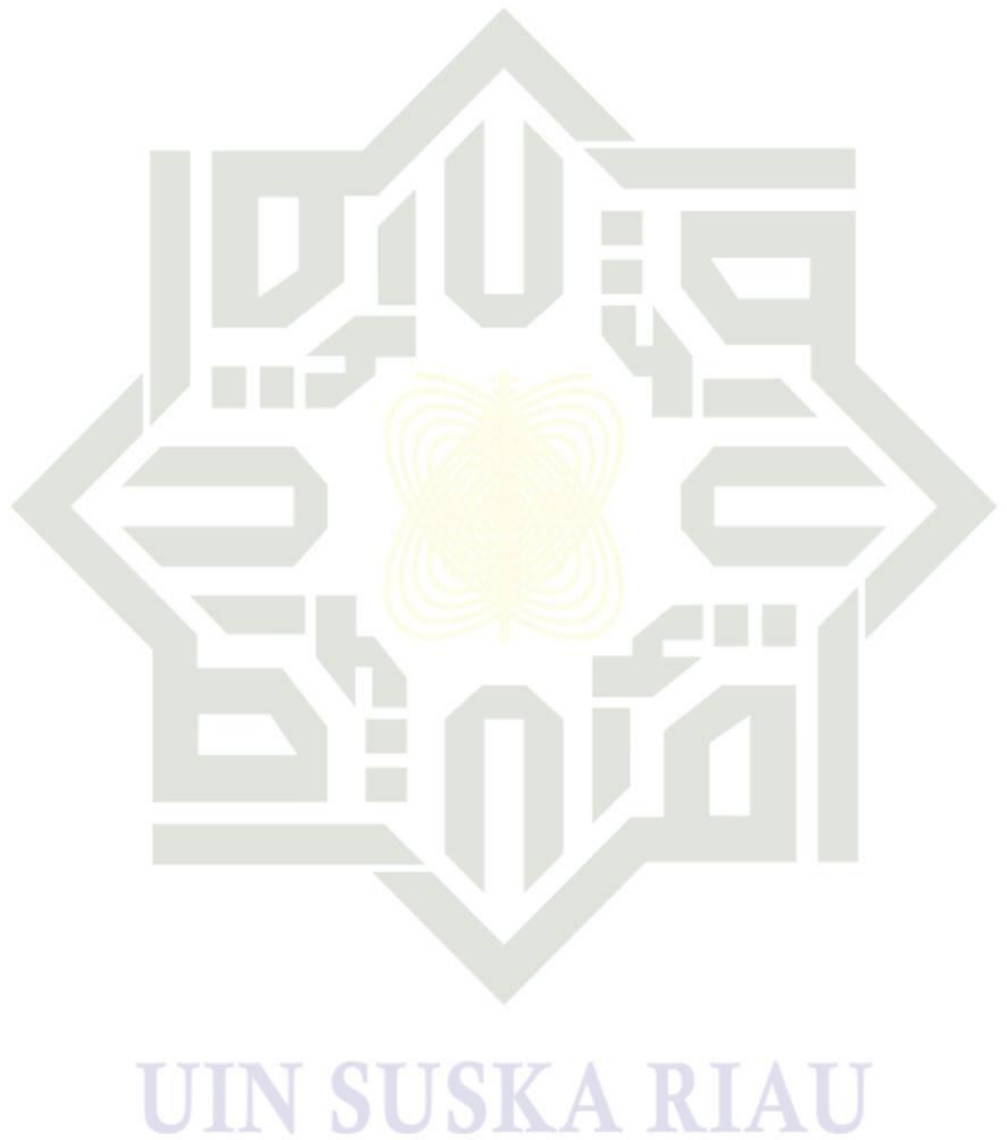
DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

BIOGRAFI PENULIS

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Perbandingan Antara Teori dan Praktek
-----------	---------------------------------------



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemajuan suatu negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri yaitu berupa pajak untuk dapat meningkatkan penerimaan dari sektor pajak, pemerintah harus membuat perangkat peraturan dalam perundang-undang perpajakan yang memberikan jaminan kepastian hukum dan peningkatan mutu pelayanan perpajakan kepada wajib pajak.

Self assesment system yang berlaku di Indonesia, memberikan wajib pajak kepercayaan sekaligus tanggung jawab yang besar untuk menghitung, menyetor dan melaporkan kewajiban pajaknya. Hal ini tidak dapat berjalan secara efektif apabila wajib pajak tidak memiliki pengetahuan yang cukup di bidang perpajakan. Direktur Jenderal pajak hal ini hanya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan sistem tersebut. Agar *self assesment system* berjalan secara efektif, keterbukaan dan pelaksanaan penegakan hukum merupakan hal yang penting. Penegakan hukum ini dapat dilakukan dengan adanya pemeriksaan atau penyidik pajak. Pemeriksaan pajak merupakan instrumen yang baik untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak, baik formal maupun material dari peraturan perpajakan, yang tujuan utamanya untuk menguji dan meningkatkan kepatuhan perpajakan wajib pajak. Dengan memberlakukan sistem tersebut wajib pajak diberikan kepercayaan oleh

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

pemerintah untuk menjalankan kewajiban perpajakan atas kesadaran sendiri dan penuh rasa tanggung jawab.

Setiap wajib pajak wajib menghitung pajak yang terutang dan menyampaikan jumlah yang terutang melalui surat pemberitahuan sesuai dengan peraturan perundang-undang perpajakan, apabila wajib pajak menghitung jumlah pajaknya dan melaporkan jumlah pajak dalam surat pemberitahuan tidak benar, misalnya pembenaan biaya ternyata melebihi yang sebenarnya sesuai dengan peraturan perundang-undang perpajakan atau wajib pajak diduga tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya. Maka Direktur Jenderal Pajak akan melakukan pemeriksaan dan verifikasi terhadap wajib pajak tersebut setelah hasil pemeriksaan dan hasil verifikasi tersebut maka Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak.

Surat Ketetapan Pajak adalah surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak kurang bayar, Surat Ketetapan Kurang bayar tambahan, Surat Ketetapan Kurang Pajak nihil, atau Surat Ketetapan Pajak lebih bayar. Surat Ketetapan Pajak ini berfungsi sebagai sarana untuk melakukan koreksi fiskal terhadap wajib pajak tertentu yang nyata-nyata memenuhi ketentuan perpajakan, sarana untuk mengenakan sanksi administrasi perpajakan, sarana untuk menagih pajak, sarana untuk mengembalikan pajak dalam hal lebih bayar dan sarana untuk memberitahukan jumlah pajak yang terutang.

Dalam hal pemohon telah menjadi wajib pajak, apakah wajib pajak telah memenuhi kewajiban mengisi SPT dan menghitung pajak terutangnya. Bila ternyata belum maka kepada wajib pajak diberikan surat pemberitahuan tahunan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

(SPt) dengan harapan untuk dipenuhi sebagai bahan bagi aparat pajak menetapkan pajak terutang yang dicerminkan pada diterbitkan surat ketetapan pajak (SKP). Dengan diterbitkan SKP maka timbul utang pajak yang menjadi dasar penagihan pajak.

Menurut Muhammad Rusjdi (2007: 20-5) menjelaskan bahwa pembetulan surat ketetapan pajak yaitu, ketetapan yang tidak benar, bentuk kesalahan/kekeliruan, surat keputusan pembetulan, pembetulan berulang-ulang, jangka waktu penyelesaian pembetulan 12 bulan, dan penyelesaian lewat waktu

Hal ini sesuai dengan sistem pemungutan pajak yang diterapkan pada waktu itu, yakni menetapkan pajak oleh Aparatur pajak (*Official assessment*). Dengan official assessment ini maka Aparatur pajak dituntut untuk aktif mencari dan mendaftar subjek pajak menjadi wajib pajak.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk menulis laporan tugas akhir dengan judul **“TATA CARA PENERBITAN SURAT KETETAPAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK KPP MADYA PEKANBARU”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis dapat mengambil rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak KPP Madya Pekanbaru?
2. Bagaimana pelaksanaan Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak KPP Madya Pekanbaru?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. untuk mengetahui Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan pajak di Kantor Pelayanan Pajak KPP Madya Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui Pelaksanaan Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak KPP Madya Pekanbaru.

2. Manfaat Penelitian

- a. Untuk penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan yang penulis peroleh selama dibangku kuliah.
- b. Untuk wajib pajak, penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi kepada wajib pajak, khususnya mengenai tata cara penerbitan surat ketetapan pajak pada kantor pelayanan pajak kpp madya pekanbaru.
- c. Untuk penelitian selanjutnya, penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan informasi kedepannya pada bidang penelitian perpajakan selanjutnya.

1.4 Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor KPP Madya Pekanbaru

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Juli sampai dengan agustus 2019.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data deskriptif. Pengertian analisis data secara deskriptif adalah teknis analisis yang digunakan dalam menganalisis data dengan membuat gambaran data-data yang terkumpul.

- a. Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian melalui sumber utama (seperti informan melalui wawancara) atau melalui hasil pengamatan yang dilakukan sendiri oleh peneliti.
- b. Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia di lokasi penelitian berupa sejarah berdirinya kantor KPP Madya Pekanbaru, struktur organisasi, uraian tugas dan beberapa informasi lainnya mengenai kantor KPP Madya Pekanbaru.

4. Tekni pengumpulan data

Menurut Sugiyono (2012: 150) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategi dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Peneliti menggunakan beberapa cara dalam pengumpulan data yaitu:

- a. Observasi yaitu pengamatan secara langsung di KPP Madya Pekanbaru yang berhubungan langsung dengan permasalahan penelitian penulis.
- b. Wawancara yaitu melakukan tanya jawab secara langsung dengan pihak terkait yang dianggap bisa memberikan keterangan yang dibutuhkan penulis.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Dokumen yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada atau catatan-catatan yang tersimpan, baik itu berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, dan lain sebagainya.

5. Analisi Data

Menurut Ardhana dalam Yaya Suryana (2015: 270) menjelaskan bahwa analisi data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Penulis menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan penjelasan yang deskriptif, yaitu mengolah data-data yang telah dapat dan membandingkan masalah teori dan praktek dengan ketentuan tertentu sehingga dapat ditarik kesimpulan.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tugas akhir ini, terhadap beberapa bab dengan uraian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM

Bab ini menjelaskan deskripsi atau gambaran umum Kantor Pelayanan pajak Kpp Madya Pekanbaru. Uraian tugas dalam kantor pelayanan pajak kpp madya pekanbaru serta struktur organisasi unit kerja kantor pelayanan pajak kpp madya pekanbaru.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Bab ini berisikan pembahasan yang menjelaskan tata cara penerbitan surat ketetapan pajak.

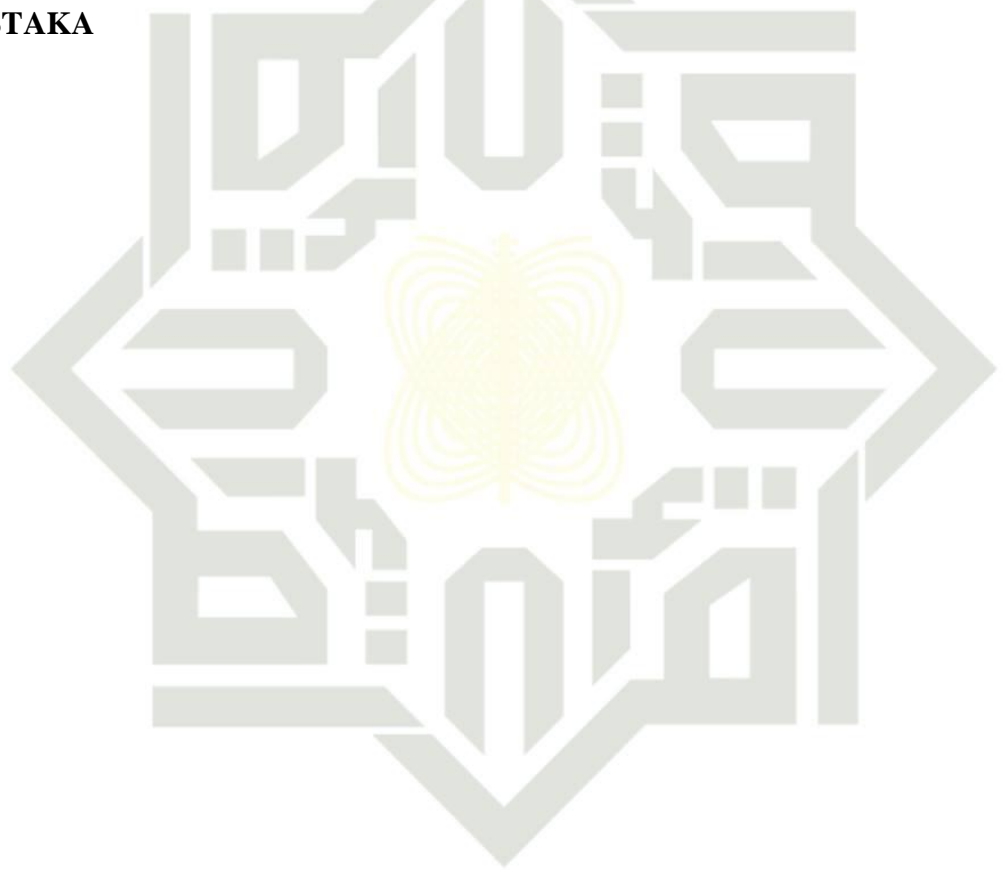
BAB IV : PENUTUP

Bab ini menguraikan kesimpulan dan hasil penulisan yang ditemukan, kemudian memberikan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Gambaran Umum Mengenai Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) adalah unit kerja dari Direktorat Jendral Pajak yang melaksanakan pelayanan dibidang perpajakan kepada masyarakat baik yang terdaftar sebagai wajib pajak maupun belum, di dalam lingkup wilayah kerja Direktorat Jendral Pajak (DJP).

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya atau Medium Tax Office (MTO) adalah unit kerja vertikal dibawah Direktorat Jendral Pajak (DJP) yang harus mengadministrasi wajib pajak besar regional. Hal ini sebagai akibat dari perubahan organisasi kantor pelayanan dari organisasi berbasis jenis pajak menjadi organisasi organisasi berdasarkan fungsi.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) modern terbagi dalam empat jenis, yaitu:

1. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Besar
2. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya
3. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama
4. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Khusus

Di Riau dan Kepulauan Riau kantor wilayah Direktorat Jendral Pajak (DJP) terdiri dari tiga belas (13) kantor, yaitu:

1. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Pekanbaru
2. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Batam
3. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan
4. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Senapelan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Batam
5. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bintan
6. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanjung Pinang
7. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanjung Balai Karimun
8. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Dumai
9. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pangkalan Kerinci
10. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Rengat
11. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bangkinag
12. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bengkalis

2.2 Sejarah Berdirinya Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru

Madya

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Pekanbaru, beralamat di JL.MR.SM.Amin (Ring Road Arengka II) Pekanbaru, didirikan berdasarkan KMK Nomor238/KMK.01/2006 tanggal 9 Mei 2006 dan mulai efektif sejak tanggal 1 Juli 2006. Struktur kantor ini menganut paradigma baru, yaitu berdasarkan fungsi sehingga tanggungjawab wewenang serta alur kerja sama masing-masing unit menjadi lebih fokus, yang pada akhirnya akan menciptakan efisiensi dan efektifitas dalam pemberian Pelayanan, bimbingan dan pengawasan pada Wajib Pajak. Alamat Kantor Pelayanan Pajak Sekarang masih menempati gedung bersama dengan KPP Pratama Pekanbaru Tampan di JL. MR.SM.Amin (Ring Road Arengka II) Pekanbaru.

2. Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Pekanbaru.

1. Visi Direktorat Jendral Pajak

“Menjadi institusi pemerintah penghimpun pajak negara yang terbaik di wilayah Asia Tenggara dan mewujudkan pelayanan perpajakan yang profesional dengan kinerja yang baik serta dapat dipercaya untuk dapat meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktur Jendral Pajak (DJP) Riau”.

2. Misi Direktorat Jendral Pajak

“Menyelenggarakan fungsi administrasi Perpajakan dengan menerapkan Undang-Undang Perpajakan secara adil dalam rangka membiayai Penyelenggaraan Negara demi Kemakmuran Rakyat serta untuk meningkatkan penerimaan dan pendapatan negara melalui pajak”.

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi tersebut, maka diperoleh sasaran yang dicapai oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Pekanbaru, yaitu:

- a. Tercapainya Penerimaan Pajak
- b. Terlaksananya Peraturan Perundang-undangan Perpajakan
- c. Melakukan Pemberkasan Berkas-Berkas Wajib Pajak Dengan Baik
- d. Melakukan Himbauan Kepada Wajib Pajak Agar Memenuhi Kewajiban Perpajakannya
- e. Peningkatan Sarana dan Prasarana Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Pekanbaru

- f. Intensifikasi dan Ekstifikasi Terhadap Subjek Pajak dan Objek Pajak
- g. Melakukan Update Terhadap Perubahan Data Wajib Pajak
- h. Melakukan In House Training dan Rapat Pembinaan Secara Rutin

2.4 Logo Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Logo Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Pekanbaru menggunakan logo Direktorat Jendral Pajak (DJP) sebagai logo perusahaan, dikarenakan seluruh kantor pelayanan pajak (KPP) Madya berada dibawah naungan Direktorat Jendral Pajak (DJP). Adapun logo dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Pekanbaru sebagai berikut :



Gmbar 2.1. Lambang Kementrian Keuangan Direktur Jendral Pajak.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Arti Lambang Tersebut Adalah :

1. Keterangan Umum :

Moto : Negara Dana Raksa

Bentuk : Segilima Dengan Ukuran 5 CM dan Tinggi 7 CM

Tata Warna : Biru Kehitam-hitaman, Kuning Emas, Putih dan Hijau.

Lukisan :

- a. Padi Dengan Pajak 17 Butir
- b. Kapas Sepanjang 8 Butir Terdiri Dari Masing-Masing 4 Buah Berlengkung
- c. 5 Sayap
- d. Gada
- e. Seluruh Unsur-Unsur Tersebut Tergambar Dalam Ruang Segi Lima

2. Susunan :

- a. Dasar Segi Lima Berwarna Biru Kehitaman
- b. Padi Kuning Emas
- c. Kapas Putih Dengan Kelopak Hijau
- d. Sayap Kuning Emas
- e. Gada Kuning Emas
- f. Bokor Kuning Emas
- g. Pita Putih
- h. Motto (Semboyan) Biru Hitam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Makna :

- a. Padi sebanyak 17 bulir berwarna kuning emas dan kapas sebanyak delapan butir dengan susunan empat buah berlengkung lima dan berwarna putih dengan kelopak berwarna hijau. Keduanya melambangkan cita-cita Indonesia sekaligus diberi arti tanggal lahirnya negara Republik Indonesia.
- b. Sayap berwarna kuning emas melambangkan ketangkasan dalam menjalankan tugas.
- c. Gada berwarna kuning emas melambangkan daya upaya menghimpun, mengarahkan dan mengamankan keuangan negara.
- d. Ruangan segilima berwarna biru kehitam-hitaman melambangkan dasar Negara Republik Indonesia yaitu Pancasila.

4. Arti Keseluruhan :

Makna dari keseluruhan lambang tersebut sesuai dengan motto “Nagara Dana Rakca” adalah ungkapan suatu daya yang mempersatukan dengan menyerasikan dalam gerak kerja untuk melaksanakan tugas Kementrian Keuangan.

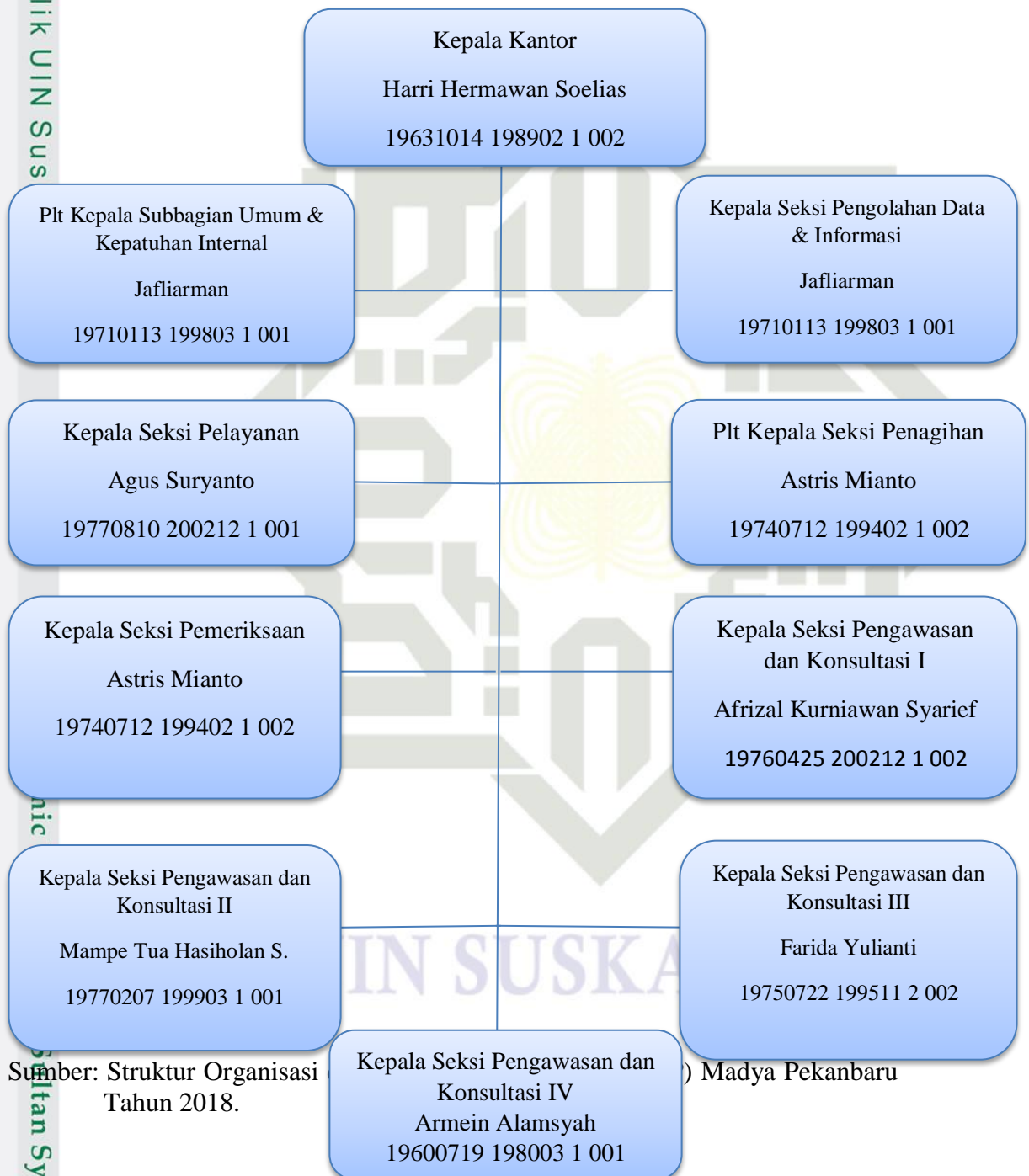
2.5. Struktur Organisasi Unit Kerja KPP Madya Pekanbaru

Struktur organisasi merupakan suatu kerangka yang memperlihatkan sejumlah tugas-tugas dan kejadian-kejadian untuk mencapai tujuan organisasi. Hubungan antara fungsi-fungsi wewenang dan tanggung jawab setiap anggota didalamnya, biasanya bekerjasama dengan baik untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

Dalam suatu perusahaan yang menentukan bentuk organisasi adalah pimpinan yang bertujuan untuk mempermudah pimpinan dalam melaksanakan

tugas-tugas yang menentukan bagian-bagian pekerjaan serta merupakan suatu alat untuk memberikan wewenang dan tanggung jawab atas pekerjaan yang diberikan kepada bawahan.

2.6 Struktur Organisasi



) Madya Pekanbaru

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.7 Tugas dan Fungsi

1. Tugas

KPP Wajib Pajak besar dan KPP Madya mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan dan pengawasan Wajib Pajak, dibidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya dalam wilayah wewenangny berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Fungsi

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 54. KPP Madya menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyuluhan Perpajakan.
- b. Pelaksanaan registrasi Wajib Pajak.
- c. Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak.
- d. Pelaksanaan konsultasi Perpajakan.
- e. Pembetulan ketetapan Pajak.
- f. Pelaksanaan administrasi kantor.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2.8. Bagian Unit Kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Pekanbaru

Susunan bagian unit organisasi KPP Pratama Pekanbaru Madya terdiri

dari:

1. Kepala Kantor
2. Sub Bagian Umum

Terdiri dari :

- a. Pelaksana Kesekretariatan
- b. Pelaksana Bendahara
- c. Pelaksana Kepegawaian
- d. Pelaksana Rumah Tangga
3. Seksi-seksi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Madya :
 - a. Seksi Pengelolaan Data dan Informasi
 - b. Seksi Pelayanan
 - c. Seksi Penagihan
 - d. Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal
 - e. Seksi pengawasan dan konsultasi I.II.III.IV
 - f. Kelompok Fungsional Pemeriksaan Pajak

Adapun uraian tugas pokok pada masing-masing Bagian pada Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan adalah sebagai berikut :

1. Kepala Kantor
 - a. Mengkordinasikan penyusunan rencana kerja kantor pelayananpajak sebagai bahan penyusunan rencana strategis kantor wilayah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Mengkordinasikan penyusunan rencana pengamanan penerimaan pajak berdasarkan potensi pajak, perkembangan kegiatan ekonomikeuangan dan realisasi penerimaan tahun lalu.
- c. Mengkordinasikan pelaksanaan tindak lanjut kesepakatan sesuai arahan kepala kantor wilayah.
- d. Mengkordinasikan rencana percairan dana strategis dan potensi dalam rangka intensifikasi/ekstensifikasi perpajakan.
- e. Mengkordinasikan pengelolaan data guna menyajikan informasi perpajakan.

2. Sub Bagian Umum

Mengkordinasikan tugas Pelayanan Kesekretariatan dengan cara mengatur kegiatan tata usaha dan kepegawaian, keuangan serta rumah tangga perlengkapan untuk menunjang kelancaran tugas kantor Pelayanan Pajak.

3. Seksi Pengelolaan Data dan Informasi

Melakukan pengumpulan, Pencarian dan Pengelolaan Data, Penyajian Informasi Perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pengamatan potensi perpajakan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filing serta penyiapan laporan kinerja.

4. Seksi Pelayanan

Mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengelolaan pemberitahuan, serta penerimaan surat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi Wajib Pajak, serta melakukan kerjasama perpajakan.

5. Seksi Penagihan

Adapun tugas seksi penagihan :

- a. penagih aktif.
- b. Penundaan dan angsuran tunggakan pajak.
- c. Urusan penata usahaan piutang pajak.
- d. Membuat keputusan atas permohonan angsuran/penunda pembayaran piutang pajak dari Wajib Pajak.
- e. Memberi Surat Tagihan (ST).

6. Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal

Mempunyai tugas melakukan usulan pemeriksaan, penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran surat perintah pemeriksaan pajak, pemantauan serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya. Pengendalian intern, pengelolaan resiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tidak lanjut hasil pengawasan, serta penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis.

7. Seksi pengawasan dan konsultasi I.II.III.IV

Mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, bimbingan atau himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kerja Wajib Pajak melakukan rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka

melakukan intensifikasi, usulan pembetulan ketetapan pajak dan melakukan evaluasi hasil banding seksi pengawasan dan konsultasi.

8. Kelompok Fungsional Pemeriksaan Pajak

Mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.9 Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertika Direktorat Jendral Pajak

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) diseluruh jajaran Direktorat Jenderal Pajak terdiri dari 3 (tiga) jenis yaitu :

1. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wajib Pajak Besar terdiri dari KPP Wajib Pajak Dua dan KPP Usaha Milik Negara.
2. KPP Madya terdiri dari KPP Penanaman Modal Asing, KPP Perusahaan Masuk Bursa, KPP Badan dan Orang Asing, KPP Madya Pekanbaru, KPP Madya Palembang, KPP Madya Medan, KPP Madya Batam , KPP Madya Tangerang, KPP Madya Bekasi , KPP Madya Jakarta Pusat, KPP Madya Jakarta Barat, KPP Madya Jakarta Selatan, KPP Madya Jakarta Timur, KPP Madya Jakarta Utara, KPP Madya Bandung, KPP Madya Semarang, KPP Madya Surabaya, KPP Madya Sidoarjo, KPP Madya Malang, KPP Madya Balikpapan, KPP Madya Denpasar, KPP Madya Makassar.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama

Pembentukan KPP Wajib Pajak Besar dan KPP Madya telah diselesaikan pada akhir tahun 2006, sedangkan KPP Pratama diselesaikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada akhir tahun 2008 Sebagaimana lazimnya KPP yang menerapkan sistem administrasi perpajakan modern KPP Pratama juga memiliki karakteristik-karakteristik :

- a. Organisasi berdasarkan fungsi
- b. Sistem informasi yang terintegrasi
- c. Sumber daya manusia yang kompeten
- d. Sarana kantor yang memadai
- e. Tata kerja yang transparan
- f. Penggabungan KPP, KPPBB

Prinsip penggabungan KPP, KPPBB dan Karikpa adalah tidak menghilangkan tugas dan fungsi sebelumnya ada dimasing-masing seksi pada KPP Pratama sesuai dengan fungsinya. Seksi-seksi yang memiliki tugas dan fungsi yang sama digabung menjadi seksi yang ada di KPP Pratama.

Fungsi Keberatan (Psl 25 UU KUP dan Psl 16 UU PBB), pengurangan/penghapusan sanksi administrasi dan pembatalan ketetapan pajak (Psl 36 UU KUP) dan penghapusan PBB (Psl 19 UU PBB) yang sebelumnya ada di KPP dan KPPBB seluruhnya dialihkan ke Kanwil.

Fungsi Pemeriksaan yang sebelumnya dilaksanakan di KPP, Karikpa, dan Kanwil sekarang dialihkan ke Pejabat Fungsional Pemeriksaan, sedangkan fungsi bukti permulaan dan penyidikan yang semula dilaksanakan oleh Karikpa dan Kanwil.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2.10 Nilai-Nilai Dan Kode Etik Pegawai Direktorat Jendral Pajak

Dalam Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-334/PJ/2012 tanggal 23 Juni 2008 Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak tahun 20012-2014 telah ditetapkan terhitung mulai tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 yang berisi visi, misi, nilai, tujuan, sasaran, strategi, program, dan indikator kinerja Direktorat Jenderal Pajak untuk periode tersebut Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak (RenStra DJP) untuk periode 3(tiga) tahun.

Berdasarkan RenStra DJP tersebut visi DJP adalah “ Menjadi institusi pemerintah penghimpun pajak negara yang terbaik di wilayah Asia Tenggara” dan misi DJP adalah “Menyelenggarakan fungsi administrasi perpajakan dengan menerapkan undang-undang perpajakan secara adil dalam rangka membiayai penyelenggaraan negara demi kemakmuran rakyat”.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut, DJP berpedoman kepada nilai-nilai sebagai berikut :

1. Profesionalisme

Memiliki kompetensi dibidang profesi dan menjalankan tugas dan pekerjaan sesuai dengan kompetensi,kewenangan,serta norma-norma profesi, etika, dan sosial.

Integritas

Menjalankan tugas dan pekerjaan dengan memegang teguh Kode Etik dan prinsip-prinsip moral yang diterjemahkan dengan bertindak jujur, konsisten dan menepati janji.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Team Word

Memiliki kemampuan untuk bekerja sama dengan orang atau pihak lain, serta membangun network untuk menunjang tugas dan pekerjaan.

Inovasi

Memiliki pemikiran yang bersifat terobosan dan atau alternatif pemecahan masalah yang kreatif dengan memperhatikan aturan dan norma yang berlaku.

Keempat nilai-nilai tersebut menjadi organisasi yang di anut oleh Direktorat Jenderal Pajak dan menjadi acuan perilaku bagi seluruh sumber daya manusia DJP dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya. Dalam pelaksanaan tugas diharapkan seluruh jajaran DJP menjunjung tinggi nilai-nilai tersebut dan mengaplikasikannya sehingga dapat diperoleh kinerja yang maksimal, dan memudahkan DJP dalam mencapai visi dan misinya. Kewajiban dan Larangan dalam Kode Etik Pegawai DJP sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PM.03/2007 tanggal 23 Juli 2007 tentang Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan yang mengikat Pegawai Direktorat Jenderal Pajak dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta dalam pergaulan sehari-hari.

Kode Etik Pegawai DJP berisi kewajiban dan larangan pegawai yang bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan Disiplin Karyawan
- b. Menjamin terpeliharanya tata tertib

- c. Menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan iklim kerja yang kondusif
- d. Menciptakan dan memelihara kondisi kerja serta perilaku yang profesional dan
- e. Meningkatkan citran dan kinerja pegawai

2.1.1. Kewajiban Dan Larangan Dalam Kode Etik Pegawai Direktur Jendral Pajak (DJP)

1. Setiap Karyawan Mempunyai Kewajiban Antara Lain:
 - a. Menghormati agama, kepercayaan, budaya, dan adat istiadat orang lain.
 - b. Bekerja secara profesional, transparan, dan akuntabel.
 - c. Mengamankan data dan/atau informasi yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak
 - d. Memberikan pelayanan kepada wajib pajak, sesama pegawai, atau pihak lain dalam pelaksanaan tugas dengan sebaik-baiknya
 - e. Mentaati perintah kedinasan
 - f. Bertanggung jawab dalam penggunaan barang inventaris milik Direktorat Jenderal Pajak
 - g. Menaati panutan yang baik bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan
 - h. Bersikap, berpenampilan, dan bertutur kata secara sopan
2. Setiap Pegawai Dilarang:
 - a. Bersikap diskriminatif dalam melaksanakan tugas.
 - b. Menjadi anggota atau simpatisan aktif partai politik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Menyalahgunakan kewenangan jabatan baik langsung maupun tidak langsung
- d. Menyalahgunakan fasilitas kantor
- e. Menerima segala pemberian dalam bentuk apapun baik langsung maupun tidak langsung dari wajib pajak, sesama pegawai, atau pihak lain yang menyebabkan pegawai patut diduga memiliki kewajiban yang berkaitan dengan jabatan atau pekerjaannya
- f. Menyalahgunakan data atau informasi perpajakan
- g. Melakukan perbuatan yang patut diduga dapat mengakibatkan gangguan, kerusakan, dan atau perubahan data pada sistem informasi milik Direktorat Jenderal Pajak
- h. Melakukan perbuatan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma kesusilaan dan dapat merusak citra serta martabat Direktorat Jenderal Pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan penulis dan hasil data yang diperoleh dari penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Pekanbaru, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Menteri keuangan nomor 145/PMK.03/2012 tentang tata cara penerbitan Surat Ketetapan Pajak, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Pajak. pada peraturan tersebut dijelaskan bahwa SKPKB diterbitkan dalam hal terdapat pajak yang kurang bayar berdasarkan hasil pemeriksaan dan hasil verifikasi. SKPKBT diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan dan hasil verifikasi terdapat data baru atau hasil factor pajak yang mengakibatkan jumlah pajak yang terhitung SKTN diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap surat pemberitahuan apabila jumlah pajak yang di bayar sama dengan jumlah pajak yang terutang SKPLB diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap surat pemberitahuan terdapat jumlah pajak yang di bayar lebih besar dari pada jumlah pajak yang terhutang dan hasil ferivikasi terdapat kebenaran atas permohonan pengembalian kelebihan pajak yang seharusnya tidak terhutang.
2. Berdasarkan hasil penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Madya pekenbaru Surat Ketetapan Pajak (skp) diterbitkan berdasarkan nota penghitungan, nota penghitungan dibuat dari hasil pemeriksaan dan hasil verifikasi. Pemeriksaan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

dilakukan terhadap wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perPajakannya, pemeriksaan bisa dilakukan terhadap *standard Operating Procedur* (SOP) SPT yang disampaikan oleh wajib Pajak termasuk peredaran bruto atau penghasilan bruto dan setiap jenis-jenis Pajaknya juga harus diperiksa, pemeriksaan dapat dilakukan dengan wawancara kepada wajib Pajak terkait.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan penarikan kesimpulan, maka penulis dapat memberikan saran terutama pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Pekanbaru, untuk lebih meningkatkan sosialisasi peraturan perPajakan melalui penyuluhan, papan pengumuman, maupun penjelasan-penjelasan undang dan penerapannya secara teknis terhadap wajib Pajak agar Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan pada tahunnya tidak terlalu banyak terutama untuk SKPKB dan tidak lagi terdapat kesalahan pada wajib Pajak saat memenuhi kewajiban perPajakannya.

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran Surat At-Taubah ayat 29

Bohari, 2012. *Hukum Pajak*, Edisi 9, Cetakan 9, Rajawali Pers, Jakarta.

Direktorat Jenderal Pajak, 2013. *Undang-undang KUP dan peraturan pelaksanaannya, Jakarta*.

Gusfahmi. 2007. *Pajak menurut pandangan Syari'ah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Mardiasmo. (2016). *perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Muljono Djoko. 2011 . *Ketentuan umum dan tatacara perpajakan lengkap dengan uu No.28/2007*, yogyakarta: CV. Andi Offset.

Mardiasmo, 2009, *Perpajakan*. Edisi Revisi 2009. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-23/PJ/2014 tentang bentuk dan isi nota perhitungan, surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-5/PJ/2009 tentang prosedur penerbitan Surat Ketetapan Pajak.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/pmk.03/2012 tetang tatacara penerbitan Surat Ketetapan Pajak.

Resmi, Siti. 2011. *Perpajakan*, Jakarta: Salemba Empat.

Sukardji, Untung, 2014. *Pajak Pertambahan Nilai, Edisi Revisi*, Cetakan 10, Cetakan 10 Rajawali Pers Jakarta.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif R&D*. Bandung: Alfabeta

Suryana, Yaya. 2015. *Metode Penelitian Manajemen Pendidikan*. Bandung: CV . Pustaka Setia

Tapsuria Billy Ivan, 2010. *Pokok-Pokok Ketentuan Umum Perpajakan*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Waluyo, 2011, *tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan lengkap dengan uu No 28/2007*, Jakarta.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PEDOMAN WAWANCARA

Lampiran 1: Lembaran Panduan Wawancara

Panduan Wawancara

“Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Pada Kantor Madya Pekanbaru

Tanggal : 21 Juli 2019

Tempat : Kantor Pajak Madya Pekanbaru

1. Apa saja jenis- jenis Surat Ketetapan Pajak?
2. Bagaimana Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Berdasarkan Hasil Pemeriksaan?
3. Bagaimana Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Berdasarkan Hasil Verifikasi?

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



RIWAYAT HIDUP PENULIS

REVI ASRAINI, lahir di Batu Bersurat pada tanggal 07 Juli 1997. Anak kedua dari tiga bersaudara, dari pasangan ayahanda Imprima dan ibunda Asmawati. Pendidikan formal yang ditempuh oleh penulis adalah SDN 02 Batu Bersurat Kecamatan XIII Koto Kampar, lulus pada tahun 2010. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMP N 01 Batu Bersurat, lulus pada tahun 2013, penulis melanjutkan pendidikan di SMA N 01 Batu Bersurat dan lulus pada tahun 2016. Tak cukup mengenyam pendidikan selama 12 tahun, penulis pun melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Negeri dengan mengambil program studi Diploma 3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sebagai tugas akhir perkuliahan Penulis melaksanakan penelitian pada bulan 05 Juli 2019 di Kantor Pelayanan Pajak Madya Pekanbaru dengan judul **Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Pada KPP Madya Pekanbaru**. Penulis dinyatakan lulus pada sidang munaqasah tanggal 31 Desember 2019 dengan IPK terakhir 3,06 dengan prediket memuaskan dan berhak menyandang gelar Ahli Madya (A.Md).